

- » KAJIAN OECD TERHADAP SEKTOR PENDIDIKAN DI INDONESIA
- » PERUMUSAN KERANGKA KUALIFIKASI INDONESIA
- » KETIDAKHADIRAN GURU DI INDONESIA
- » PERENCANAAN STRATEGI PENDIDIKAN DI PEDALAM DAN DAERAH TERPENCIL DI TANAH PAPUA
- » MENINGKATKAN KUALITAS PENGAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
- » MENINGKATKAN PENILAIAN MURID



Foto: PIH Kemendikbud

## Kajian OECD terhadap Sektor Pendidikan di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu dari kelima negara prioritas dalam kemitraan *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* yang ditujukan untuk menjadi anggota OECD dalam kurun waktu 15-20 tahun ke depan. Laporan OECD, Kajian atas Kebijakan Nasional di Bidang Pendidikan: Pendidikan di Indonesia – Bersiap Menghadapi Tantangan, diluncurkan pada bulan Maret 2015, melalui satu kegiatan khusus di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2015, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Bappenas, Kementerian Keuangan serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Kajian yang didukung ACDP ini dimulai pada tahun 2014. ACDP sendiri mengeluarkan laporan latar belakang berjudul Perkembangan Pembangunan Pendidikan di Indonesia 2012 sebagai sumber informasi utama bagi tim OECD. Laporan kajian ini mengacu pada sejumlah studi ACDP lainnya.

## Perumusan Kerangka Kualifikasi Indonesia

Dukungan terhadap perumusan Kerangka Kualifikasi Indonesia 2014-2015 bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, kesesuaian dan daya saing pendidikan nasional serta pembentukan ke-terampilan, melalui penetapan kerangka kualifikasi serta sistem dan kapasitas terkait.

Perumusan kerangka ini, khususnya diharapkan dapat berkontribusi terhadap:

- i) Peningkatan kualifikasi yang dapat memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja dengan lebih baik,
- ii) Standar yang konsisten bagi para penyedia layanan pendidikan/pelatihan,
- iii) Meningkatnya akses terhadap informasi bagi calon murid, pegawai dan para pemangku kepentingan lainnya,

iv) Jalur yang fleksibel bagi pembelajaran seumur hidup melalui sistem pendidikan dan pelatihan, dan

v) Pengakuan internasional bagi kualifikasi Indonesia dalam konteks peningkatan mobilitas pekerja serta persaingan sistem pendidikan dan pelatihan antar negara.

Pakar nasional dan internasional memberikan bantuan teknis kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi dalam hal pelatihan informal dan pelatihan kejuruan berbasis-kerja.

Anjangkarya ke sejumlah negara terpilih akan membantu pembelajaran dari praktik terbaik internasional. Program ini secara khusus akan berkontribusi pada pengembangan kualifikasi program belajar pendidikan tinggi tertentu dan penjaminan mutu, penetapan sistem pengakuan atas pembelajaran sebelumnya – termasuk kesetaraan dan transfer kredit antar kualifikasi pendidikan yang berbeda, serta pembentukan Dewan Kualifikasi Indonesia.

## Ketidakhadiran Guru di Indonesia

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 ini merupakan salah satu studi ketidakhadiran guru yang paling menyeluruh dan berskala besar yang pernah dilakukan di manapun di dunia.

Dalam studi ini dua tim yang telah menerima pelatihan khusus melakukan dua kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya ke 880 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebagai sampel yang tersebar di enam wilayah Indonesia.

Dengan menggunakan metodologi yang sama seperti dalam penelitian sebelumnya mengenai ketidakhadiran guru di Indonesia, desain studi ini juga memungkinkan dilakukannya analisis perbandingan dari perubahan angka kehadiran dan dampaknya pada sejumlah kebijakan dan program dari waktu ke waktu.

Studi ini mengungkapkan bahwa hanya satu dari sepuluh guru tidak hadir di sekolah. Temuan ini tentu membesarakan harapan bangsa Indonesia.

Namun hendaknya hal ini tidak membuat kita lekas berpuas diri, karena di antara guru-guru yang dijadwalkan mengajar 12%-14% di antaranya ditemukan ada di sekolah tetapi tidak berada di dalam kelas. Guru-guru yang tidak hadir dalam kelas sangat sering ditemukan berada di sekolah namun tidak mengerjakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan akademis ataupun administratif.

Tingkat ketidakhadiran guru sangatlah bervariasi antar jenis guru, wilayah, dan jenis sekolah, studi ini juga mengidentifikasi sejumlah karakteristik yang berkontribusi pada tingkat ketidakhadiran yang lebih tinggi.

Foto: PIH Kemendikbud



Foto: PIH Kemendikbud

Misalnya ketidakhadiran guru laki-laki umumnya lebih tinggi daripada guru perempuan, angka ketidakhadiran juga tampak lebih banyak di kalangan guru yang mengajar di lebih dari satu sekolah, di sekolah-sekolah terpencil, di sekolah-sekolah dengan sarana fisik yang kurang memadai dan di sekolah-sekolah yang kepala sekolahnya juga tidak hadir di sekolah.

Angka ketidakhadiran guru yang tinggi ini terbukti berdampak pada operasional sekolah, serta kepada guru-guru dan murid-murid.

Dua hal penting yang perlu disinggung dalam kebijakan:

**Pertama**, menyoroti faktor penentu (*determinant*) dari ketidakhadiran guru, agar selanjutnya dapat menekan angka ketidakhadiran mereka di sekolah dan di dalam kelas;

**Kedua**, menangani ketidakhadiran guru di sekolah ketika hal itu terjadi, untuk meminimalisir dampak dari hilangnya waktu mengajar dan belajar para murid.

Studi ini menghasilkan sejumlah pilihan kebijakan pada tingkat nasional, kabupaten/kota dan sekolah untuk mengurangi dan pada saat bersamaan meningkatkan manajemen ketidakhadiran guru.

Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan termasuk mempertimbangkan ulang kebijakan nasional terkait jam kerja guru, penguatan dukungan dan pengawasan terhadap proses belajar-mengajar, penguatan proses seleksi kepala sekolah dan pengembangan kapasitas mereka, serta menyediakan dukungan dan kebijakan yang jelas bagi sekolah untuk dapat menangani ketidakhadiran guru dan untuk meminimalisir dampaknya pada kegiatan belajar murid.



## Perencanaan Strategi Pendidikan di Pedalaman dan Daerah Terpencil di Tanah Papua

Studi perencanaan strategi ini mengidentifikasi masalah-masalah utama dan berbagai opsi bagi penyelenggaraan pendidikan di pedalaman dan daerah terpencil di dua provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat (keduanya disebut sebagai Tanah Papua).

Lebih dari 70 persen dari populasi di kedua provinsi ini tinggal di daerah pedalaman (atau di desa-desa di luar perkotaan) dan sekitar 40 persen tinggal di wilayah pegunungan tinggi atau di pulau yang terpencil dan terisolasi.

Akses yang terbatas ke pendidikan berkualitas, tingginya angka kemiskinan, rendahnya kualitas kesehatan, beragamnya kebudayaan dan bahasa ditambah infrastruktur yang minim merupakan faktor-faktor yang berkontribusi pada lingkungan yang paling menantang dan memiliki Indeks Pembangunan Manusia terrendah di Indonesia dan di seluruh dunia.

Berdasarkan praktik terbaik yang dilakukan baik di tingkat internasional maupun lokal, studi ini mengemukakan argumen bagi pemerintah daerah untuk menata kembali fokus pelayanannya agar masyarakat terdorong untuk menuntut penambahan ketersediaan layanan pendidikan yang berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan khusus wilayah tertinggal dan populasi terpencil.

Usulan tersebut termasuk adopsi model pendidikan multi-bahasa berbasis bahasa ibu yang cocok dan efektif, serta mereformasi Kolese Pendidikan Guru (KPG) Papua. Rekomendasi lainnya mencakup kajian terhadap pemanfaatan potensi TIK, penetapan Standar Pelayanan Minimal bagi sekolah-sekolah di pedalaman dan daerah terpencil, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk memastikan terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas. Kebutuhan untuk memastikan tersedianya layanan pendidikan se-suai permintaan masyarakat menjadi inti dari strategi ini. Dialog yang efektif dengan masyarakat di wilayah target menjadi hal yang sangat penting bagi perwujudan layanan yang tepat.

Studi ini memberi masukan terhadap berbagai aspek dalam perencanaan strategis lima tahun Pemerintah Provinsi Papua, dan juga terhadap fokus pendidikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, di mana untuk pertama kalinya, pentingnya penggunaan bahasa ibu di kelas-kelas awal diajui dan disebutkan secara khusus bahwa bahasa ibu sebaiknya digunakan sebagai bahasa pengantar.

Foto: PIH Kemendikbud



Foto: PIH Kemendikbud

## Meningkatkan Kualitas Pengajaran Pendidikan Agama Islam

ACDP mendukung Kementerian Agama melalui studi Pendidikan Agama di sekolah dan madrasah dalam perspektif mempromosikan nilai-nilai multikultural, toleransi dan demokrasi. Studi tersebut mengungkapkan bahwa pendidikan agama Islam yang diajarkan di sekolah secara umum tidak menarik, tidak mendorong pada tumbuhnya nilai-nilai tersebut dan di sejumlah kasus justru menggugah perilaku yang radikal. Studi ini menggarisbawahi perlunya meningkatkan tujuan dan konten pendidikan agama Islam, serta metodologi pengajaran dan kompetensi pengajarnya.

Terkait hal tersebut, ACDP membantu program peningkatan kapasitas Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas pengajaran pendidikan agama Islam. Sebanyak empat puluh guru pendidikan agama Islam diundang untuk mengikuti program Pelatihan bagi Pelatih mengenai Metodologi Pengajaran Pendidikan Agama Islam di University of Oxford Inggris bulan Desember 2014 lalu. Di sana, para partisipan terpapar dengan praktik pengajaran yang reflektif, termasuk cara menyusun rencana ajar yang diperkaya dengan dialog kelas. Mereka juga belajar tentang manajemen dinamika kelas, serta penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk membantu kegiatan mengajar. Para partisipan juga berkesempatan mengunjungi sebuah sekolah, akademi komunitas, institusi agama dan yayasan untuk memperkaya wawasan tentang pendidikan agama sesuai konteks dan praktik di Inggris.

Program pelatihan ini merupakan langkah awal menuju skala peningkatan kapasitas yang lebih besar, termasuk pengembangan dan penguji-cobaan panduan, silabus dan modul pelatihan dalam negeri. Program-program ini selanjutnya akan diimplementasikan secara nasional oleh Kementerian Agama, meliputi pelatihan kepada lebih dari 200 pelatih di tingkat provinsi, dan lebih dari 1.000 pelatih di tingkat kabupaten, untuk akhirnya melatih sedikitnya 145.000 guru pendidikan agama Islam Indonesia pada tahun 2016.

Inisiatif ini mendukung prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama, dalam rangka membentuk toleransi, karakter, nilai dan rasa saling menghargai antar agama, sebagai bagian dari revolusi mental seperti yang tercantum dalam bab sektor pendidikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.



Foto: PIH Kemendikbud

## Meningkatkan Penilaian Murid

Program bantuan teknis dan pengembangan kapasitas ini mendukung Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan mulai tahun 2015, dengan tujuan memberi kontribusi terhadap peningkatan kualitas hasil pembelajaran murid melalui pengembangan sistem penilaian yang handal, valid dan efisien, baik pada tingkat nasional maupun tingkat sekolah.

Hal ini berlandaskan pada pentingnya peran penilaian dalam memenuhi sejumlah tujuan seperti: mendukung kegiatan belajar-mengajar yang efektif dalam kelas, tersedianya informasi yang terpercaya tentang kinerja individu agar dapat meluluskannya ke jenjang berikutnya dalam sistem pendidikan maupun kepada dunia pekerjaan, juga untuk memberi gambaran kepada para pembuat keputusan mengenai tingkat pencapaian dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, di tingkat usia atau kelas tertentu.

Tujuan khusus studi ini mencakup:

- i) Menyelaraskan struktur Pusat Penilaian Pendidikan dengan tugas dan fungsinya dalam sistem pendidikan nasional, serta penguatan kapasitas teknis para stafnya,
- ii) Meningkatkan perancangan, administrasi, analisis dan pelaporan kegiatan ujian nasional (termasuk versi yang berbasis-komputer) dan Program Ujian Nasional Indonesia,
- iii) Mendukung guru-guru kelas dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran mereka, melalui pengembangan penilaian bagi pembelajaran; dan
- iv) Memberikan masukan bagi persiapan penyusunan Kerangka Kerja Penilaian dan Peta Jalan untuk membangun sistem penilaian yang terstruktur dan berstandar global, yang mampu menjawab berbagai tujuan penilaian yang berbeda yang dibutuhkan di masa depan.

Berbagai studi kebijakan dan dokumen-dokumen analisis lainnya tersedia di website **ACDP**: [www.acdp-indonesia.org](http://www.acdp-indonesia.org)

Pemerintah Republik Indonesia (diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS), Pemerintah Australia, Uni Eropa dan Asian Development Bank (ADB) membentuk Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan atau Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP). ACDP adalah sebuah fasilitas untuk mempromosikan dialog kebijakan dan memfasilitasi reformasi kelembagaan dalam rangka mendukung prioritas strategis nasional dan meningkatkan kinerja pendidikan. Dukungan Uni Eropa, melalui Education Sector Support Program (ESSP), juga termasuk dukungan anggaran sektor, bersama-sama dengan program pengembangan kapasitas Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar. Dukungan Australia adalah melalui Australia's Education Partnership with Indonesia. Newsletter ini dibuat dengan dukungan dana yang disediakan oleh Pemerintah Australia dan Uni Eropa, melalui ACDP.

### Sekretariat ACDP

#### Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

#### Badan Penelitian dan Pengembangan

#### (BALITBANG)

Gedung E, Lantai 19  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan  
Jakarta 10270  
Tel. : (021) 578-51100  
Fax: (021) 578-51101

Email : [secretariat@acdp-indonesia.org](mailto:secretariat@acdp-indonesia.org)

Website : [www.acdp-indonesia.org](http://www.acdp-indonesia.org)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



KEMENTERIAN AGAMA



Kementerian PPN/  
Bappenas



EUROPEAN UNION



Australian  
Aid



ADB